

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait strategi pemerintah kota Metro dalam mewujudkan kota yang berintegritas tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah kota Metro untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kota yang berintegritas tinggi sudah dilakukan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah yang dianalisis melalui strategi reformasi administrasi yaitu: (a) privatisasi dan koproduksi, (b) debirokratisasi, (c) reorganisasi, (d) manajemen publik yang efektif dan (e) *value for money*. Selanjutnya, kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Metro dalam mewujudkan kota yang berintegritas tinggi, yaitu: (a) minimnya komitmen, (b) minimnya kompetensi sumber daya, (c) adanya budaya feodal, (d) adanya budaya permisif dan (e) resistensi birokrasi.

Keberhasilan pemerintah kota Metro dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan nilai indeks integritas nasional dan mewujudkan kota Metro sebagai kota yang berintegritas tinggi tidak lepas dari peran serta Walikota Metro sebagai kepala daerah. Predikat pelayanan publik terburuk dalam survei indeks integritas nasional tahun 2011 tidak lantas membuat

Walikota Metro berdiam diri. Segala bentuk perbaikan dilakukan untuk memperbaiki wajah pelayanan publik di kota Metro. Ketegasan dan keberanian Walikota Metro dalam mengambil keputusan untuk melakukan reformasi pelayanan publik patut diacungi jempol. Berbagai upaya dilakukan untuk mereformasi pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat. Ketegasan dan keberanian Walikota Metro inilah yang menjadi penting dan menarik untuk dijadikan contoh agar kepala daerah lainnya juga dapat melakukan perubahan demi terwujudnya *good governance*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen integritas yang tinggi dari seluruh aparat pemerintah daerah kota Metro yang dapat diwujudkan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Metro sehingga dapat meningkatkan komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan kota Metro sebagai kota yang berintegritas tinggi.
2. Menggalakkan sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat kota Metro tentang mudahnya pelayanan di kota Metro dan larangan pemberian gratifikasi kepada petugas pemberi layanan agar masyarakat sadar akan pentingnya pengurusan pelayanan sendiri dan menghilangkan budaya gratifikasi tersebut.

3. Memperketat kembali prosedur pelayanan publik dan pemberian sanksi yang tegas kepada oknum perantara yang masih menawarkan jasanya kepada masyarakat.
4. Adanya perbaikan fasilitas pelayanan publik di tempat-tempat yang masih belum memadai, seperti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro yang memerlukan pembangunan aula dalam mendukung proses penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Pembinaan yang lebih rutin lagi dari Walikota Metro dan Satgas Peningkatan Pelayanan Publik kepada seluruh petugas pelayanan publik melalui *coffee morning* dan rapat koordinasi agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan mencegah adanya oknum internal di lingkungan organisasi publik.
6. Membuat skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah kota Metro yang akan dilaksanakan, sehingga kegiatan-kegiatan pemerintahan akan dilaksanakan berdasarkan urutan prioritasnya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pemborosan dalam penggunaan APBD Kota Metro.